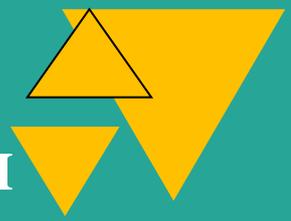
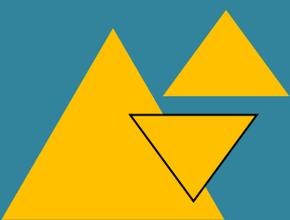




LAPORAN KINERJA
ISTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



**KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

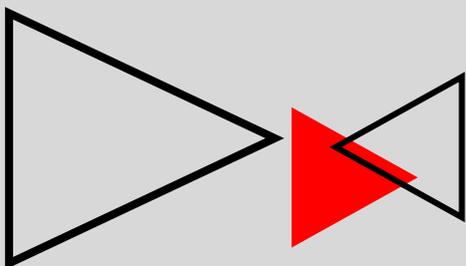




BAB 1

PENDAHULUAN

- A. UMUM
- B. ORGANISASI



PENDAHULUAN

A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintahan Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah

ahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan Tonra merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah **200,32** Km² dengan Jumlah Penduduk **13,874** Jiwa dan Jumlah KK. **3.650** dengan jarak 50 km dari Kota Kabupaten Bone.

Kecamatan Tonra termasuk wilayah yang beriklim sedang dengan temperatur udara rata-rata berkisar 23⁰C-30⁰C. Kecamatan Tonra terdiri dari 11 (Sebelas) Desa, 1 (Satu) UPT Kesehatan yang berada di Desa Bulu-Bulu, 1 UPT KB & KS dan 1 BPP.

Secara Geografis Kecamatan Tonra terletak pada sebelah Selatan Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mare
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salomekko
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng

a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Kecamatan Tonra memiliki 11 Desa dengan ketinggian diatas permukaan laut 35 M yakni :

1. Desa Rappa
2. Desa Samaenre
3. Desa Libureng
4. Desa Padatuo
5. Desa Bulu-Bulu
6. Desa Gareccing
7. Desa Bonepute
8. Desa Biccoing
9. Desa Muara
10. Desa Bacu
11. Desa Ujunge



Kecamatan Tonra memiliki luas tanah sawah 2426 Ha, dan tanah kering 4575 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan Tonra memiliki 1 pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, pasar tersebut merupakan pasar tradisional.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

B. ORGANISASI

5

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tonra diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor : 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

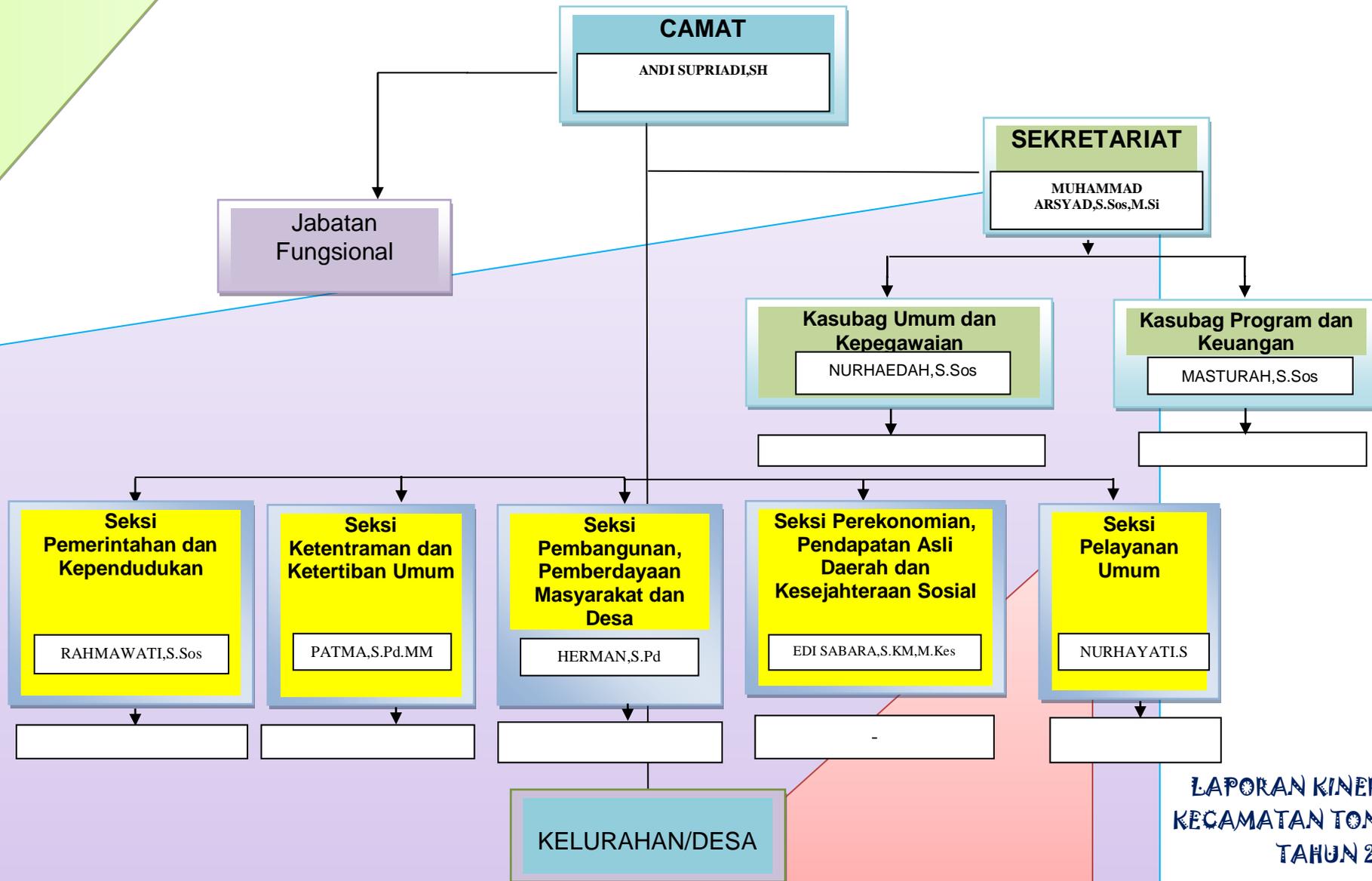
Tugas Pokok Kecamatan Tonra yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TONRA



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN TONRA
TAHUN 2021

SUMBER DAYA KECAMATAN TONRA

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tonra mempunyai 17 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Tonra

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-
	- Analis Data dan Informasi	1
	- Pramu Bakti	-
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	-
	- Pengadministrasi Pemerintahan	-
	- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1
	- Analis Keamanan	-
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analisis Desa dan Kelurahan	-
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
	- Analis Pemberdayaan Masyarakat	1

	-	Pengadministrasi Umum	1
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		1
	-	Pengadministrasi Umum	-
	-	Analisis Perekonomian	-
9	KASI PELAYANAN UMUM		1
	-	Pengadministrasi Umum	1
	-	Analisis Pelayanan	-
JUMLAH			17

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Tonra 2021

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN TONRA								
NO	JENIS PENDIDIKAN	JML	NO	GOL.	JML	NO	JABATAN	JML
1	SD	-	1	I	-	1	STRUKTURAL	17
2	SMP	-	2	II	3	2	FUNGSIONAL	
3	SMA	3	3	II	-			
4	DIPLOMA 1	-	4	III	11			
5	DIPLOMA 2	-	5	IV	3			
6	DIPLOMA 3	-						
7	STRATA 1	12						
8	STRATA 2	2						
JUMLAH		17	JUMLAH		17	JUMLAH		17

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Tonra 2021

C. ISU STRATEGI

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu

perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tonra adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tonra sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini.

Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

- h. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
- b. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Tonra.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.

BAB II PERENCANAAN KERJA



- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- D. PERJANJIAN KINERJA
- E. STANDAR PENILAIAN KERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tonra, maka Kecamatan Tonra dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	60.15 Peringkat B	60.20 Peringkat B	60.30 Peringkat B	70.20 Peringkat BB	80.01 Peringkat BB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	80	80	85	90	100

Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tonra digunakan untuk mengukur kinerja utama atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tonra ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Tonra yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tonra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	BB	BB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	80	80	85	90	100

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada Tahun 2021 Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2021 menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tonra Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9,159,647,059
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124,862,000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,210,000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,000,000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,480,000
J U M L A H				9,328,199,081

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Tabel 2.6 Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- A. CAPAIAN KEJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Tonra dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas

perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tonra meliputi :

Tujuan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	100%	Tercapai/Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	96,26	113,25 %	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
Rata-rata				107.12%	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan

predikat dengan nilai 107.12% untuk indikator pertama *Sangat Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indikator kedua telah *Sangat Tercapai*.

2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tonra 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Tonra apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100,3%	100,6%	102,1%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	102,5%	103,6%	112,8%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	101,9%	104%	120,5%

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	B			-	-	100 %		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	80	95,14	95,52	96,26			95,14	95,52	96,26		
Rata-rata		80	95,14	95,52	96,26			95,14	95,52	96,26		

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Tonra

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Tonra yang dapat disandingkan persentase capaian kerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Tonra Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	BB	B	B	B		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	95,14	95,52	96,26		

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Tonra

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indicator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator

tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tonra dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
/Standar Nasional Lainnya**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
			Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	95	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	96,26	-	-

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Tonra

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tonra tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	100%	100%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	113,25 %	113,25 %	√	√		
Rata-Rata			107,12%	√			

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Tonra

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tonra tahun 2021 dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

- 1.Perencanaan Kinerja**
- 2.Pengukuran Kinerja**
- 3.Pelaporan Kinerja**

4.Evaluasi Kinerja

5.Capaian Kinerja

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2021-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tonra.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Tonra Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai 107,12 (Sangat Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Tonra menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Tonra.
Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tonra untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.
Jenis pelayanan public pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 107,12 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung
 Dalam pencapaian indikator ini meskipun 107,12 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :
 1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
 2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)
 Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :
 1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
 3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

6.ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Tonra dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tonra adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber

daya Kecamatan Tonra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	c	D	$\frac{e}{d/c} \times 100\%$	f	g	$\frac{h}{g/f} \times 100\%$	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100	9.159.647.081	8.849.887.540	96.62	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	96,26	107,12	168.552.000	130.072.000	77.17	12,8

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2021 Kecamatan Tonra

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tonra terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APiP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 107,12 % dan persentase capaian realisasi anggaran 96,26 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,82 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 12,8 %.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANA/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tonra sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	96.62	96.62	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	69.18	69.18	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100.00	100.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100.00	100.00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	100.00	100.00	
JUMLAH					100	96,26	96,26	

Sumber Data: LPPD Tahun 2021 Kecamatan Tonra

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota :

- *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan jasa Pelayanan Umum
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 ⇒ Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

- *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

- *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*
- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

REALISASI ANGGARAN

(Berdasarkan C3) Pagu anggaran belanja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.9.328.199.081,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
Program:			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 9,159,647,081	Rp 8,849,887,540	96.62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 7,210,000	Rp 7,210,000	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 124,862,000	Rp 86,382,000	69.18
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000	100.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 9,480,000	Rp 9,480,000	100.00
TOTAL	Rp 9,328,199,081	Rp 8,979,959,540	96.26

Sumber data : C3 des 2021

BAB IV PENUTUP



- A. SIMPULAN UMUM**
- B. KENDALA PELAKSANAAN
DAN UPAYA MENGATASI**

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

SIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Tonra dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2021 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 107,12 % atau kategori *sangat berhasil*.

KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Kendala Pelaksanaan

- Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Upaya Dalam Mengatasi

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

- Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

Lampiran

Lampiran
secara lengkap dapat
diakses dengan memindai
QR Barcode berikut:



Bulukumba, 28 Januari 2021

CAMAT,

ANDI SUPRIADI,SH

Pangkat : Pembina

Nip : 19731030 200604 1 009